

Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012 – 2022

Ridho Irawan^{1*} dan Irsad Lubis²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
Jl. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

*e-mail : ridhoirawan413@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

25 Oktober 2023

Revised :

27 Oktober 2023

Accepted :

10 November 2023

Kata Kunci :

Korupsi, Pertumbuhan
Ekonomi, Penanaman Modal
Dalam Negeri, Pengeluaran
Pemerintah

Keywords:

Corruption, Economic
Growth, Domestic
Investment, Government
Expenditures

Korupsi menjadi masalah serius yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi, masalah ini masih ada dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara ini, salah satunya adalah sektor perekonomian. Pada sektor perekonomian, korupsi memiliki dampak serius pada perekonomian Indonesia. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seringkali disalahgunakan atau dicuri sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak korupsi, investasi dalam negeri, dan belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series* dan mencakup periode 2012 – 2022. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder dan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti website Yayasan Transparansi Internasional dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja pemerintah (G) pada periode tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PE). Sedangkan jumlah kasus korupsi (COR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PE).

The Influence of Corruption on Economic Growth in Indonesia 2012 – 2022

ABSTRACT

Corruption has emerged as a serious issue that has long captured attention in Indonesia. Despite numerous efforts to address corruption, the problem persists and affects various aspects of life in the country, notably in the economic sector. Within the economic domain, corruption exerts a substantial impact on Indonesia's economy. Funds that should be allocated for development and community welfare are often misused or embezzled, thereby impeding economic growth and development. The aim of this study is to examine the impact of corruption, domestic investment, and public expenditure on economic growth. The data employed in this research is time series data covering the period from 2012 to 2022. The data, of a secondary nature, is collected from various sources,

such as the website of the Transparency International Foundation and the Central Statistics Agency. The findings of this research reveal that domestic investment (PMDN) and government expenditure (G) during the specified period have a positive and significant influence on economic growth (PE). Meanwhile, the number of corruption cases (COR) does not affect economic growth (PE).

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu isu utama dalam dunia politik dan ekonomi. Terlepas dari upaya berbagai pemerintah dan organisasi internasional untuk mengurangi korupsi, masalah ini tetap menjadi tantangan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut *World Bank dan International Monetary Fund (IMF)* Korupsi merupakan praktek yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sering kali melalui penyuapan, pemerasan, atau manipulasi sistem. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, telah menjadi salah satu hambatan serius bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di berbagai negara (Fukuyama, 2014). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dampak negatif korupsi telah menjadi perhatian serius, karena dampaknya yang merusak pada perekonomian suatu negara (Huang, 2016).

USAID dalam Nawatmi (2012) juga menyuarakan bahwa korupsi dapat merusak pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Di sektor swasta, korupsi akan meningkatkan biaya bisnis akibat dari penyuapan, biaya administrasi dalam negosiasi dengan pejabat, dan risiko pelanggaran perjanjian. Hal ini terbukti dari sejumlah penelitian empiris mengindikasikan bahwa tindakan korupsi memiliki potensi untuk mengurangi tingkat investasi, menurunkan produktivitas belanja publik, dan mengurangi alokasi sumber daya., yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang terhambat. (Spyromitros & Panagiotidis, 2022 ; Grabova, 2014).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau tersebar dari sabang sampai marauke dengan beragam potensi ekonomi yang sangat melimpah dengan sumber kekayaan alam serta penduduk yang besar, sehingga Indonesia disebut dengan negara yang memiliki sumberdaya melimpah. Potensi Sumber Daya yang melimpah dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi perekonomian di Indonesia yang akan berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Rapii et al., 2022). Akan tetapi, pembangunan ekonomi Indonesia terhambat akibat tingginya angka korupsi di negara Indonesia. Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi peristiwa yang tidak pernah ada habisnya. Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang hingga saat ini marak terjadi di tanah air, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, tindakan ini juga bertentangan dengan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan perekonomian. Korupsi bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum konvensional, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan yang di luar batas norma dan luar biasa (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Banyak undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberantas korupsi telah disahkan. Namun kenyataannya, tindak pidana korupsi terus berulang dan semakin rumit. Tentu saja upaya pemberantasan korupsi Sudah menjadi kewajiban bersama seluruh komponen masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi, tidak hanya menjadi tugas eksklusif aparat penegak hukum atau pemerintah.. Harus diakui upaya

pemberantasan korupsi hingga saat ini belum optimal dalam kasus penyelesaiannya. Hal ini tercermin dari rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan terus meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia di Indonesia.

Tabel 1. Data Jumlah Korupsi, Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	Pertumbuhan Ekonomi
2018	454	38	5.17
2019	271	40	5.02
2020	444	37	-2.1
2021	533	38	3.7
2022	579	34	5.31

Sumber : *Transparency International, Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari data yang mencatat peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya. dari tahun 2019 yang berjumlah 271 kasus menjadi 579 kasus pada tahun 2022. Pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang memiliki indeks 40 menjadi 34 pada tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi setiap tahun, mencapai tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2020 yaitu -2.1 dan paling tinggi pada tahun 2022 yaitu 5.31.

Pembangunan pada dasarnya mengacu pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Lebih lanjut, pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang mencakup berbagai aspek seperti perubahan-perubahan yang dilandaskan pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan berbagai institusi nasional. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Pertumbuhan ekonomi endogen menyatakan bahwa Teori pertumbuhan endogen mengakui pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil (Todaro & Smith, 2011). Upaya pemberantasan kejahatan ekonomi, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi, peraturan yang ketat, dan penegakan hukum yang kuat, dapat menciptakan kepercayaan dan stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disamping itu, pada teori *Shadow Economics* atau ekonomi bayangan yang merupakan aktivitas ekonomi yang beroperasi di luar kerangka formal dan hukum ekonomi suatu negara (North et al., 2013). Menurut Schneider & Enste (2013) dalam bukunya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bayangan dapat memicu siklus yang merusak pertumbuhan ekonomi. Transaksi-transaksi dalam ekonomi bayangan merupakan transaksi ilegal yang tidak terhitung dalam pendapatan negara sehingga semakin memperburuk keterbatasan anggaran dalam sektor publik. Penyelidikan dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat relevan, memperhatikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan tujuan utama bagi sebagian besar pemerintah dan masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait korupsi dan pertumbuhan ekonomi karena dampak korupsi yang dihasilkan. d'Agostino et al (2016) dalam penelitiannya yaitu "*Government spending, corruption and economic growth*" mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Lutfi et al (2020) Nawatmi (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun sebagian besar penelitian menegaskan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian lain menunjukkan bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.. Paksha Paul (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Does corruption foster growth in Bangladesh?*” menemukan adanya hubungan positif antara tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan variabel investasi dan variabel pengeluaran publik sebagai variabel untuk membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), dan alat analisis tersebut diimplementasikan melalui program e-views 12. Data yang digunakan merupakan data time series yang mencakup periode tahun 2012 hingga 2022. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk situs web Transparency International dan Badan Pusat Statistik. Adapun, model ekonometrika sebagai berikut:

$$PE_t = \beta_0 + \beta_1COR_t + \beta_2PMDN_t + \beta_3G_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

PE	: Pertumbuhan Ekonomi (%)
COR	: Jumlah Kasus Korupsi (Jumlah)
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar rupiah)
G	: Realisasi Pengeluaran Pemerintah (Miliar rupiah)
ε	: <i>Error term</i> (tingkat kesalahan)
β_0	: Konstanta
$\beta_1... \beta_3$: Koefisien regresi variabel independen
t	: tahun ke t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heterokesdatisitas

Uji untuk mendeteksi adanya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi dapat dilakukan menggunakan *Uji White*.

Tabel 2. Heteroskedasticity Test

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	79.38294	Prob. F(9,1)	0.0869
Obs*R-squared	10.98462	Prob. Chi-Square(9)	0.2768
Scaled explained SS	4.514841	Prob. Chi-Square(9)	0.8744

Sumber : E-views (diolah)

Dari hasil analisis regresi, uji White menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk *Obs*Rsquared* adalah 0,2768, Angka tersebut melebihi tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima, menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

2. Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengamatan pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Dalam konteks penelitian ini, uji statistik Durbin Watson digunakan untuk menilai keberadaan autokorelasi dengan mengamati nilai (D-W) yang dihasilkan.

Tabel 3. Autokolerasi

R-squared	0.830083	Mean dependent var	4.826364
Adjusted R-squared	0.757261	S.D. dependent var	1.083552
S.E. of regression	0.533850	Akaike info criterion	1.857884
Sum squared resid	1.994971	Schwarz criterion	2.002573
Log likelihood	-6.218362	Hannan-Quinn criter.	1.766678
F-statistic	11.39886	Durbin-Watson stat	2.649242
Prob(F-statistic)	0.004385		

Sumber : *E-views* (diolah)

Berdasarkan data yang diberikan, diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 1.970569. Dalam perbandingannya dengan nilai batas bawah dU (1.9280), yaitu 2.643842, dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari batas bawah tersebut. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi dalam model regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

1. Uji Regresi

Tabel 4. Uji Regresi

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares
Date: 10/19/23 Time: 23:16
Sample: 2012 2022
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.00642	2.630905	6.844195	0.0002
PMDN	2.47E-05	5.90E-06	4.178070	0.0041
COR	0.001151	0.001697	0.678077	0.5195
G	-9.92E-06	2.03E-06	-4.889874	0.0018

Sumber : *E-views* (diolah)

$$PE = 18.00642 + 0.0000247PMDN + 0.00115COR - 0.00000992KM + e$$

Apabila nilai PMDN, COR, dan Government bernilai 0, maka nilai konstanta Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 18.00642. Koefien regresi PMDN sebesar 0.0000247 artinya, dalam interpretasi hasil regresi, ditemukan bahwa setiap peningkatan sebesar satu miliar dalam PMDN maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0.0000247%, dengan asumsi jika variabel-variabel lainnya tetap konstan. Koefisien regresi COR sebesar 0.00115 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu kasus dalam COR berhubungan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.00115%, dengan diasumsikan variabel-variabel lainnya konstan. Sementara itu, koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah (G) sebesar -0.00000992 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu miliar dalam variabel Pengeluaran Pemerintah (G) berhubungan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.00000992%, dengan asumsi jika variabel-variabel lainnya konstan..

2. Uji t-Statistik (Parsial)

Tabel 5. Uji t-Statistik

Dependent Variable: PE
 Method: Least Squares
 Date: 10/19/23 Time: 23:16
 Sample: 2012 2022
 Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.00642	2.630905	6.844195	0.0002
PMDN	2.47E-05	5.90E-06	4.178070	0.0041
COR	0.001151	0.001697	0.678077	0.5195
G	-9.92E-06	2.03E-06	-4.889874	0.0018

Sumber : *E-views* (diolah)

Variabel PMDN menunjukkan nilai t-statistik sebesar 4.178070 dan nilai probabilitas sebesar $0.0041 < 0.05$, mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, variabel Pengeluaran Pemerintah (G) menunjukkan nilai t-statistik sebesar -4.889874 dan nilai probabilitas sebesar $0.0018 < 0.05$, menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, variabel Jumlah Kasus Korupsi (COR) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.5195 > 0.05$, yang menunjukkan bahwa variabel jumlah Kasus Korupsi (COR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Uji F-statistik (Simultan)

Tabel 6. Uji F-statistik (Simultan)

R-squared	0.830083	Mean dependent var	4.826364
Adjusted R-squared	0.757261	S.D. dependent var	1.083552
S.E. of regression	0.533850	Akaike info criterion	1.857884
Sum squared resid	1.994971	Schwarz criterion	2.002573
Log likelihood	-6.218362	Hannan-Quinn criter.	1.766678

F-statistic	11.39886	Durbin-Watson stat	2.649242
Prob(F-statistic)	0.004385		

Sumber : *E-views* (diolah)

Dari hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.004985 < 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen, yaitu PMDN, COR, dan G, terhadap variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

R-squared	0.830083	Mean dependent var	4.826364
Adjusted R-squared	0.757261	S.D. dependent var	1.083552
S.E. of regression	0.533850	Akaike info criterion	1.857884
Sum squared resid	1.994971	Schwarz criterion	2.002573
Log likelihood	-6.218362	Hannan-Quinn criter.	1.766678
F-statistic	11.39886	Durbin-Watson stat	2.649242
Prob(F-statistic)	0.004385		

Sumber : *E-views* (diolah)

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0.830083 atau 83,0083%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu PMDN, COR, dan Government, memiliki pengaruh pada variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, sebesar 83,0083%, dan nilai sisanya mempengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan belanja pemerintah (G) merupakan variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, variabel Jumlah Kasus Korupsi (COR) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel pertama yaitu jumlah kasus korupsi (COR) tidak menunjukkan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Damanik & Saragih (2023) yang menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak negatif meski tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yudistira & Jember (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya khususnya penelitian Paksha Paul (2010) yang menyatakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena. Tingkat dan intensitas kasus korupsi dapat bervariasi secara signifikan antara negara, wilayah, atau periode waktu tertentu. Faktor ini bisa membuat temuan yang bersifat agregat, seperti jumlah kasus korupsi, sulit untuk mencerminkan dampak yang lebih mendalam pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, dari sisi kualitas penegakan hukum. Tingkat efektivitas dan ketatnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi dapat sangat bervariasi. Dalam beberapa negara, penegakan

hukum mungkin sangat efektif dan dapat menyebabkan pengurangan kasus korupsi. Di negara lain, penegakan hukum mungkin lemah atau korupsi di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri, yang dapat menyebabkan kasus korupsi tetap tinggi meskipun ada upaya untuk menguranginya (Kurniawan, 2018).

Variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nehemia et al., (2023) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Yuliantari et al (2016) menegaskan bahwa korupsi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Korupsi mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut mendukung teori investasi Harrod Domar yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi, dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula tingkat investasi (Sukirno, 2017). Selain itu, dalam model pertumbuhan ekonomi endogen, penekanan pada faktor internal menjadi hal penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor internal yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam model ini, peningkatan investasi dalam negeri, khususnya dalam penelitian dan pengembangan, dapat merangsang inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan (Sukirno, 2017).

Variabel selanjutnya yaitu belanja pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratama & Utama, 2019) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, penelitian oleh Koyongian et al., (2019) dengan judul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado" mencerminkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado. Teori "*Crowding Out*" Salah satu teori yang dapat menjelaskan dampak negatif pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah teori "*crowding out*." Teori ini berpendapat bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran publiknya, itu mungkin mengarah pada peningkatan suku bunga dan persaingan dengan sektor swasta untuk sumber daya keuangan. Akibatnya, sektor swasta mungkin mengurangi investasinya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dilain sisi, Keadaan Makroekonomi yang Lebih Luas. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak, perubahan dalam perdagangan global, atau krisis finansial dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan mungkin menjelaskan dampak negatif pengeluaran pemerintah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Belanja Negara (G) pada periode 2012-2022 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Di sisi lain, jumlah kasus korupsi (COR) tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PE).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, variabel Jumlah Kasus Korupsi merupakan data yang sudah terdata atau sudah masuk proses hokum. Artinya, kasus korupsi yang belum atau tidak terdeteksi tidak masuk dalam kalkulasi jumlah kasus korupsi sehingga data jumlah kasus korupsi belum mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang tingkat korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pironi, L. (2016). Government spending, corruption and economic growth. *World Development*, 84, 190–205.
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71–81.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Macmillan.
- Grabova, P. (2014). Corruption impact on Economic Growth: An empirical analysis. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing*, 6(2), 57.
- Huang, C.-J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pacific countries. *The North American Journal of Economics and Finance*, 35, 247–256.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. ., & Niode, A. . (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 13–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25431>
- Koyongian, C. L., Kidangen, P., & Kawung, G. M. . (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.17664.19.4.2017>
- Kurniawan, S. (2018). *Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Provinsi di Indonesia Periode 2014-2017*.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30–35.
- Nawatmi, S. (2012). Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi-Studi Empiris 33 Provinsi Di Indonesia (Corruption and Economics Growth In 33 Province-An Empirical Study In Indonesia). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, Mei 2013, Hal: 66-81 Vol, 2*.
- Nawatmi, S. (2013). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi-studi empiris 33 provinsi di Indonesia. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(1).
- Nehemia, S. D., Prasetya, F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2023). *Jdess 02.01.2023*. 2(1), 26–37.
- North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B., & Weingast, B. R. (2013). *In the shadow of violence: Politics, economics, and the problems of development*. Cambridge University Press.
- Paksha Paul, B. (2010). Does corruption foster growth in Bangladesh? *International Journal of Development Issues*, 9(3), 246–262.
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 [7](2337–3067), 651–680.
- Rapii, M., Jailani, H., & Utomo, D. P. (2022). *Perekonomian Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2013). *The shadow economy: An international survey*. Cambridge University Press.
- Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth

in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2129368.

Sukirno, S. (2017). *Ekonomi pembangunan: proses, masalah dan kebijakan*, edisi kedua. Prenada Media: Jakarta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.

Yudistira, I. B., & Jember, I. M. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), 121–128.

Yuliantari, E. R., Militina, T., Gaffar, A., & Umma, E. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Belanja Langsung serta Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 1(1), 44–52.